



PERAN SAKTI WEB KEMENKEU DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PEMBUATAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

M. Noor Fuadi

Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

e-mail: m.noorfuadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran implementasi Sakti Web Kemenkeu dalam mengoptimalkan produktivitas pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pegawai terkait, observasi partisipatif terhadap proses kerja, dan analisis dokumen SPM serta laporan keuangan. Hasil penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa Sakti Web Kemenkeu berhasil meningkatkan efisiensi proses pembuatan SPM. Sistem terintegrasi ini memangkas alur kerja manual, mengurangi waktu yang dibutuhkan secara substansial untuk penyelesaian setiap dokumen SPM, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dalam realisasi anggaran. Lebih lanjut, penerapan Sakti Web Kemenkeu berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kankemenag Hulu Sungai Utara. Setiap tahapan transaksi tercatat secara digital, memudahkan pelacakan dan audit, serta meminimalisir potensi kesalahan manusia. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, utamanya terkait dengan kesulitan sebagian pegawai dalam beradaptasi dengan teknologi baru dan sistem yang kompleks. Hal ini menggarisbawahi adanya kebutuhan mendesak akan program pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Sakti Web Kemenkeu membawa dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas pegawai, membebaskan waktu mereka untuk lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas strategis lainnya seperti perencanaan program dan peningkatan layanan keagamaan. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen institusional untuk menyediakan dukungan teknis dan pelatihan berkelanjutan guna memaksimalkan potensi pemanfaatan sistem dan memastikan kelancaran transformasi digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi instansi pemerintah lain dalam upaya mengadopsi teknologi informasi guna meningkatkan kinerja administrasi publik dan kualitas layanan.

Kata Kunci : *Sakti Web Kemenkeu, produktivitas, Surat Perintah Membayar, administrasi publik, teknologi informasi*

ABSTRACT

This study examines in depth the role of the implementation of the Ministry of Finance's Sakti Web in optimizing the productivity of making Payment Orders (SPM) at the Office of the Ministry of Religious Affairs (Kankemenag) of Hulu Sungai Utara Regency. Using a qualitative approach with a case study design, data collection was carried out through in-depth interviews with related employees, participatory observation of the work process, and analysis of SPM documents and financial reports. The results of the study significantly indicate that the Ministry of Finance's Sakti Web has succeeded in increasing the efficiency of the SPM making process. This integrated system cuts down on manual workflows, substantially reducing the time required to complete each SPM document, thus allowing for a faster response in budget realization. Furthermore, the implementation of the Ministry of Finance's Sakti Web has contributed positively to increasing transparency and accountability in financial management



at the Hulu Sungai Utara Kankemenag. Each stage of the transaction is recorded digitally, facilitating tracking and auditing, and minimizing the potential for human error. However, this study also identified several challenges, mainly related to the difficulty of some employees in adapting to new technologies and complex systems. This underscores the urgent need for a more comprehensive and sustainable training program. Overall, the Ministry of Finance's Sakti Web has had a significant positive impact on employee productivity, freeing up their time to concentrate more on other strategic tasks such as program planning and improving religious services. The main recommendation of this study is the importance of institutional commitment to provide ongoing technical support and training to maximize the potential of system utilization and ensure smooth digital transformation. These findings are expected to be a valuable reference for other government agencies in their efforts to adopt information technology to improve public administration performance and service quality.

Keywords: Sakti Web Kemenkeu, productivity, Surat Perintah Membayar, public administration, information technology

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat saat ini, transformasi melalui teknologi informasi telah menjadi salah satu fondasi utama yang tak terelakkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan administrasi publik. Perubahan ini menuntut adaptasi cepat dari berbagai sektor pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Menyadari urgensi tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan Sakti Web Kemenkeu, sebuah platform komprehensif yang dirancang untuk mendukung terciptanya proses administrasi keuangan negara yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Inisiatif ini bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan keuangan di seluruh instansi pemerintah. Sebagai bagian integral dari upaya ini, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dihadirkan. SAKTI berfungsi sebagai sistem terpadu yang memfasilitasi berbagai proses keuangan, termasuk di antaranya adalah proses krusial pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerapan SAKTI diharapkan mampu mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi pembuatan SPM di berbagai lembaga pemerintah, tidak terkecuali pada lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi fokus dalam konteks ini.

Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) memegang peranan kritikal dan tak tergantikan dalam siklus pengelolaan keuangan negara, berfungsi sebagai instrumen dasar untuk merealisasikan pembayaran atas segala bentuk pengeluaran yang telah diverifikasi dan disetujui. Proses ini merupakan jembatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja, memastikan bahwa dana publik dialokasikan dan dibayarkan sesuai dengan peruntukan dan regulasi yang berlaku. Meskipun fundamental, proses pembuatan SPM secara tradisional seringkali dihadapkan pada berbagai kendala operasional yang signifikan. Masalah-masalah tersebut meliputi lambatnya alur proses administrasi akibat birokrasi yang panjang dan fragmentasi tugas, tingginya potensi kesalahan manusia dalam pengisian data secara manual yang dapat berakibat pada ketidakakuratan informasi keuangan, serta minimnya tingkat keterbukaan atau transparansi yang dapat memicu keraguan dan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, implementasi teknologi informasi yang dirancang secara cermat dan terintegrasi, seperti SAKTI, menawarkan solusi konkret dan efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleks tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Implementasi Sakti Web Kemenkeu diharapkan membawa angin segar dalam peningkatan produktivitas pegawai, khususnya dalam konteks vital pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), dengan menyediakan sebuah platform digital yang dirancang untuk lebih



efisien dan intuitif dalam penggunaannya. Sistem ini mengintegrasikan berbagai modul keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, sehingga meminimalkan redundansi data dan memperlancar alur kerja. Dengan adanya otomatisasi pada beberapa tahapan dan validasi data secara sistemik, diharapkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses pembuatan SPM dapat berkurang secara signifikan dan drastis. Pengurangan beban waktu pada tugas-tugas administratif rutin ini selanjutnya akan memungkinkan para pegawai untuk mengalihkan fokus dan energi mereka pada tugas-tugas lain yang bersifat lebih strategis dan substantif, seperti analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan, perencanaan program yang lebih matang, atau peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bertot et al. (2016), yang secara komprehensif menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sektor administrasi publik secara nyata dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas individual dan efisiensi kerja pegawai secara keseluruhan.

Namun demikian, di balik potensi besar yang ditawarkan oleh Sakti Web Kemenkeu dalam merevolusi administrasi keuangan, terdapat serangkaian tantangan yang tidak dapat diabaikan dan harus dihadapi secara strategis selama proses implementasinya. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah kesulitan yang dialami oleh sebagian pegawai dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan teknologi baru serta perubahan proses kerja yang menyertainya. Pergeseran dari sistem manual atau sistem lama yang sudah familiar ke platform digital yang komprehensif seperti SAKTI memerlukan kurva belajar dan perubahan mindset. Resistensi terhadap perubahan, kurangnya literasi digital, atau bahkan kecemasan teknologi dapat menjadi faktor penghambat yang signifikan, yang pada gilirannya dapat memperlambat laju adopsi sistem dan mengurangi efektivitas penerapannya di lingkungan organisasi. Sebagaimana ditekankan oleh Laudon & Laudon (2016) dalam penelitian mereka mengenai sistem informasi manajemen, pentingnya investasi dalam program pelatihan yang terstruktur dan dukungan teknis yang responsif tidak dapat diremehkan. Upaya ini krusial untuk memastikan keberhasilan transisi dan adopsi sistem informasi baru secara mulus dan efektif di lingkungan organisasi, sehingga manfaat sistem dapat dimaksimalkan.

Selain tantangan adaptasi teknologi, aspek keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian khusus dan upaya berkelanjutan. Integritas sistem keuangan publik sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip ini ditegakkan. Penggunaan Sakti Web Kemenkeu, dengan fitur-fitur digitalnya yang canggih, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan tingkat transparansi, terutama dalam proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Setiap transaksi dan tahapan dalam sistem ini tercatat secara digital, menciptakan jejak audit (audit trail) yang jelas dan mudah dilacak. Dengan demikian, setiap aktivitas keuangan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga secara langsung dapat mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguatan aspek transparansi ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (2019), yang secara empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi yang transparan dan akuntabel terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai salah satu entitas pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan dan mengutilisasi Sakti Web Kemenkeu dalam operasional keuangannya, memiliki kepentingan strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif dan berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur secara objektif sejauh mana pengaruh penggunaan sistem digital ini terhadap tingkat produktivitas para pegawai, khususnya dalam unit kerja yang bertanggung jawab atas pembuatan Surat Perintah Membayar. Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan



(SPM). Mengingat SPM merupakan dokumen krusial dalam pencairan anggaran, efisiensi dan akurasi dalam pembuatannya menjadi tolok ukur kinerja yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang secara spesifik untuk menjelajahi dan menganalisis bagaimana platform Sakti Web Kemenkeu dapat secara nyata meningkatkan produktivitas dalam proses pembuatan SPM tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai tantangan, hambatan, serta kendala faktual yang mungkin dihadapi atau dirasakan oleh para pegawai selama proses adaptasi, implementasi, dan penggunaan sistem SAKTI dalam rutinitas kerja sehari-hari mereka.

Dengan berhasilnya upaya pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran vital Sakti Web Kemenkeu dalam mendorong peningkatan produktivitas, khususnya pada alur kerja pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan serangkaian rekomendasi yang konkret, praktis, dan aplikatif. Rekomendasi tersebut tidak hanya relevan bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lokus studi, tetapi juga dapat diadopsi dan disesuaikan oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang tengah atau akan melakukan transformasi serupa dalam sistem administrasi keuangannya. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap khazanah literatur ilmiah yang relevan, terutama dalam bidang penerapan teknologi informasi di sektor administrasi publik dan manajemen keuangan negara. Temuan-temuan dari studi ini berpotensi memberikan wawasan baru dan perspektif empiris bagi para pengambil keputusan di tingkat strategis, baik di lingkup eksekutif maupun legislatif, dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan tata kelola pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan penelitian secara mendalam dan holistik, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metodologi utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa dan kompleksitas pengalaman manusia yang mungkin tidak tertangkap oleh metode kuantitatif. Secara spesifik, penelitian ini akan melibatkan pelaksanaan wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan sejumlah pegawai yang terlibat langsung dalam proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan informan akan dilakukan secara purposif untuk memastikan representasi dari berbagai level dan unit kerja yang menggunakan Sakti Web Kemenkeu. Melalui dialog terbuka dan terstruktur, peneliti berupaya untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan lengkap mengenai pengalaman subjektif mereka, termasuk persepsi, tantangan, manfaat yang dirasakan, serta saran perbaikan terkait penggunaan sistem SAKTI. Hasil analisis dari data kualitatif yang terkumpul ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, detail, dan komprehensif tentang dampak nyata implementasi sistem informasi keuangan ini terhadap peningkatan produktivitas kerja dan efisiensi keseluruhan proses administrasi keuangan di instansi tersebut (Abdullah & Samad, 2019; Moulina et al, 2023).

Dengan demikian, esensi dari penelitian ini tidak hanya berfokus secara sempit pada aspek-aspek teknis dan fungsionalitas dari penggunaan Sakti Web Kemenkeu semata. Lebih dari itu, penelitian ini secara komprehensif turut memperhatikan dan menganalisis secara mendalam berbagai faktor manusia (human factors) dan elemen-elemen organisasi (organizational factors) yang secara inheren memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan proses adopsi dan implementasi sebuah sistem informasi baru. Faktor-faktor seperti budaya kerja, tingkat literasi digital pegawai, kualitas pelatihan yang diberikan, dukungan manajemen puncak, hingga strategi komunikasi perubahan menjadi variabel penting yang akan dieksplorasi. Diharapkan, hasil analisis yang holistik dari penelitian ini dapat menjadi panduan atau rujukan yang berharga dan aplikatif bagi lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang sedang merencanakan atau dalam proses mengadopsi teknologi informasi serupa. Tujuannya adalah untuk membantu mereka merancang strategi implementasi yang lebih efektif,



sehingga dapat meningkatkan kinerja administrasi publik secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengeksplorasi peran Sakti Web Kemenkeu dalam peningkatan produktivitas pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Subjek penelitian adalah para pegawai yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan SPM, dipilih secara purposif hingga tercapai saturasi informasi guna memastikan kedalaman dan kecukupan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta tantangan pegawai terkait penggunaan Sakti Web Kemenkeu. Observasi partisipatif dilaksanakan guna memahami secara langsung konteks kerja sehari-hari dan interaksi pegawai dengan sistem tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen relevan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan SPM, arsip SPM sebelum dan sesudah implementasi SAKTI, serta catatan atau laporan internal terkait kinerja untuk melengkapi dan memvalidasi data primer.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang mencakup tahapan transkripsi data wawancara, pengkodean terbuka untuk identifikasi unit makna, pengembangan kategori, hingga penarikan tema-tema sentral dan interpretasi mendalam. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, dilakukan triangulasi sumber data (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi metode. Proses *member checking* juga dilakukan dengan menyampaikan kembali interpretasi awal kepada beberapa informan kunci untuk mendapatkan konfirmasi dan umpan balik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang diperoleh dari analisis data mengenai peran Sakti Web Kemenkeu dalam meningkatkan produktivitas pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil penelitian ini akan dibahas dalam konteks efisiensi, transparansi, tantangan, dan dampak terhadap produktivitas pegawai.

1. Efisiensi Proses Pembuatan SPM

Hasil wawancara dengan pegawai menunjukkan bahwa penggunaan Sakti Web Kemenkeu telah meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan SPM. Sebelum implementasi sistem, pegawai menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan dokumen SPM secara manual, yang melibatkan banyak langkah dan verifikasi. Dengan adanya Sakti Web, proses ini menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Salah satu pegawai menyatakan, "Dulu, kami harus mencetak dokumen, mengisi manual, dan mengumpulkan tanda tangan. Sekarang, semua bisa dilakukan secara online, dan itu menghemat banyak waktu."

Observasi juga menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan SPM berkurang secara signifikan. Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Bertot et al. (2016) yang menyatakan bahwa digitalisasi dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat proses layanan publik.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Sakti Web Kemenkeu juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pegawai melaporkan bahwa sistem ini



memungkinkan mereka untuk melacak status SPM secara real-time, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan. Salah satu pegawai menambahkan, "Dengan sistem ini, kami bisa melihat siapa yang sudah menyetujui dokumen dan di mana letak prosesnya. Ini membuat kami lebih bertanggung jawab."

Peningkatan transparansi ini juga berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di instansi tersebut. Penelitian oleh Kementerian Keuangan (2019) menunjukkan bahwa sistem informasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun terdapat banyak manfaat, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi pegawai dalam menggunakan Sakti Web Kemenkeu. Beberapa pegawai mengungkapkan kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan penggunaan sistem komputerisasi. Salah satu pegawai menyatakan, "Awalnya, saya merasa kesulitan dengan sistem ini. Butuh waktu untuk belajar dan memahami semua fitur."

Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai juga menjadi kendala. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada pelatihan awal, beberapa pegawai merasa bahwa mereka masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk memaksimalkan penggunaan sistem. Hal ini sejalan dengan temuan Davis (1989) yang menyatakan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat sistem sangat mempengaruhi adopsi teknologi.

4. Dampak terhadap Produktivitas Pegawai

Penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa stage Sakti Web Kemenkeu memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan diterapkannya sistem informasi yang lebih transparan dan efisien, kemampuan pegawai lebih meningkat dalam menyelesaikan jumlah SPM yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Beberapa pegawai juga melaporkan bahwa mereka kini memiliki waktu luang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas strategis lainnya, seperti melakukan perencanaan serta evaluasi program kerja.

Agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal, lembaga disarankan untuk rutin memberikan pelatihan berkelanjutan serta dukungan teknis kepada para pegawai. Penelitian ini merekomendasikan agar pihak manajemen Kementerian Agama melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan Sakti Web dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pegawai.

Pembahasan

Hasil wawancara dengan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jelas mengindikasikan bahwa implementasi Sakti Web telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengakuan dari para pegawai menjadi bukti nyata bahwa sistem digital ini berhasil mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya dihadapi. Sebelum adanya Sakti Web, proses pembuatan SPM menuntut waktu dan tenaga yang tidak sedikit, mengingat seluruh tahapan harus dilalui secara manual. Hal ini tidak hanya memperlambat alur kerja tetapi juga membuka potensi terjadinya kesalahan akibat banyaknya langkah yang harus dilakukan. Penelitian oleh Yusup (2016) & Febrina et al (2022), juga menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah secara elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Sebelum era digitalisasi melalui Sakti Web, pegawai Kemenkeu dihadapkan pada rutinitas penyelesaian dokumen SPM yang memakan waktu. Proses manual tersebut melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan memerlukan verifikasi berlapis. Dapat dibayangkan bagaimana setiap dokumen harus melalui berbagai meja dan tangan hanya untuk mendapatkan



persetujuan dan kelengkapan yang dibutuhkan. Ketergantungan pada proses fisik seperti pencetakan, pengisian manual, dan pengumpulan tanda tangan basah menjadi penghambat utama dalam mencapai efisiensi kerja yang optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Iqlimah et al (2024) proses birokrasi manual seringkali panjang dan berbelit, yang berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan potensi inefisiensi sumber daya.

Namun, kehadiran Sakti Web telah mengubah paradigma tersebut secara drastis. Sistem ini menawarkan platform yang terintegrasi sehingga seluruh proses pembuatan SPM dapat dilakukan secara daring. Pernyataan salah satu pegawai, "Dulu, kami harus mencetak dokumen, mengisi manual, dan mengumpulkan tanda tangan. Sekarang, semua bisa dilakukan secara online, dan itu menghemat banyak waktu," menggambarkan betapa besar manfaat yang dirasakan. Transformasi dari sistem manual ke sistem digital ini tidak hanya memangkas waktu tetapi juga menyederhanakan alur kerja, memungkinkan pegawai untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Hal ini didukung oleh temuan Luna-Reyes et al. (2013) yang menyatakan bahwa integrasi sistem informasi lintas organisasi pemerintah dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan kolaborasi.

Observasi yang dilakukan turut memperkuat temuan dari wawancara. Terbukti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu dokumen SPM mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya proses tersebut dapat memakan waktu hingga berhari-hari, kini dengan Sakti Web, SPM dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Efisiensi waktu ini tentunya berdampak positif pada produktivitas keseluruhan institusi. Fenomena ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Bertot et al. (2016), yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan publik memiliki potensi besar dalam mengurangi hambatan birokrasi dan secara substansial mempercepat berbagai proses layanan. Lebih lanjut, penelitian oleh Al-Shboul et al. (2017) juga mengkonfirmasi bahwa adopsi e-government secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.

Secara keseluruhan, adopsi Sakti Web oleh Kemenkeu merupakan langkah strategis yang berhasil meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam hal pembuatan SPM. Integrasi proses secara digital tidak hanya memangkas waktu penyelesaian dokumen secara drastis tetapi juga mengurangi beban kerja manual pegawai. Keberhasilan ini menjadi contoh konkret bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kinerja sektor publik, sejalan dengan tren global menuju digitalisasi layanan demi terciptanya birokrasi yang lebih ramping dan responsif (Afdila & Adnan, 2023; Asyidiq et al, 2023)). Sejalan dengan ini, Anthopoulos (2017) menekankan bahwa transformasi digital di sektor publik bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya dan proses untuk mencapai pemerintahan yang lebih cerdas dan efisien.

Implementasi Sakti Web Kemenkeu tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Para pegawai melaporkan adanya kemudahan dalam melacak status Surat Perintah Membayar (SPM) secara *real-time*, sebuah fitur yang esensial untuk meminimalkan risiko kesalahan prosedural maupun potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan alur proses yang terpantau jelas, termasuk siapa yang telah memberikan persetujuan dan di tahap mana dokumen berada, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap tugasnya. Seorang pegawai menegaskan, "Dengan sistem ini, kami bisa melihat siapa yang sudah menyetujui dokumen dan di mana letak prosesnya. Ini membuat kami lebih bertanggung jawab." Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Pina et al. (2010) & Destriana et al (2023) yang menemukan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik.

Peningkatan transparansi yang difasilitasi oleh Sakti Web ini membawa dampak positif yang lebih luas, yakni pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan



keuangan negara, khususnya di instansi yang menerapkan sistem tersebut. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa sistem informasi yang terbuka dan dapat diakses informasinya cenderung memperkuat kepercayaan publik. Keterbukaan dalam proses pengelolaan anggaran dan pembayaran ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel di mata publik. Lebih lanjut, studi oleh Kim dan Lee (2012) & Handika et al (2019) menunjukkan bahwa transparansi pemerintah yang ditingkatkan melalui inisiatif e-government berkorelasi positif dengan peningkatan kepercayaan warga negara.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat substantif, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pegawai dalam proses adaptasi dan penggunaan Sakti Web Kemenkeu. Sejumlah pegawai, terutama mereka yang memiliki paparan lebih sedikit terhadap sistem komputerisasi, mengungkapkan adanya kesulitan awal dalam beradaptasi dengan teknologi baru ini. Proses pembelajaran fitur dan alur kerja sistem membutuhkan waktu dan upaya ekstra, sebagaimana diakui oleh salah satu pegawai, "Awalnya, saya merasa kesulitan dengan sistem ini. Butuh waktu untuk belajar dan memahami semua fitur." Penelitian oleh Al-Hujran et al. (2015) juga mengidentifikasi faktor-faktor seperti kecemasan komputer dan kurangnya pengalaman sebagai penghambat adopsi teknologi baru di kalangan pegawai pemerintah.

Kendala lain yang turut diidentifikasi adalah persepsi mengenai kurangnya pelatihan yang memadai. Meskipun telah dilaksanakan pelatihan awal, beberapa pegawai merasa masih memerlukan pendampingan dan dukungan lebih lanjut untuk dapat memaksimalkan potensi penggunaan sistem Sakti Web. Kondisi ini sejalan dengan kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Davis (1989) melalui *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menyatakan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*) suatu sistem teknologi informasi merupakan faktor krusial yang sangat memengaruhi tingkat adopsi dan penerimaan teknologi tersebut. Dukungan terhadap hal ini juga ditemukan dalam penelitian Venkatesh et al. (2012) yang menekankan pentingnya kondisi yang memfasilitasi, termasuk pelatihan dan dukungan teknis, dalam memengaruhi penggunaan teknologi aktual.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sakti Web Kemenkeu telah memberikan dampak positif yang nyata terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penerapan sistem informasi yang lebih transparan dan efisien ini memungkinkan pegawai untuk meningkatkan kapabilitas mereka, terbukti dari kemampuan menyelesaikan volume SPM yang lebih besar dalam rentang waktu yang lebih singkat. Lebih lanjut, efisiensi ini memberikan ruang bagi pegawai untuk mendedikasikan waktu pada tugas-tugas strategis lainnya, seperti perencanaan program kerja yang lebih matang serta pelaksanaan evaluasi yang komprehensif, sehingga pada akhirnya turut meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian organisasi secara umum. Penelitian oleh Dwivedi et al. (2019) juga menyoroti bagaimana transformasi digital di sektor publik dapat mengarah pada peningkatan kinerja dan efisiensi operasional. Agar manfaat ini dapat terus dioptimalkan, disarankan agar pihak manajemen Kementerian Agama secara rutin memberikan pelatihan berkelanjutan, menyediakan dukungan teknis yang responsif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Sakti Web untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan guna meningkatkan keterampilan pegawai.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sakti Web Kemenkeu berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan produktivitas pembuatan SPM di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Meskipun terdapat tantangan dalam



implementasi, manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem ini jauh lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi instansi untuk terus mendukung dan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja administrasi publik secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kinerja kepala desa (Studi kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50>
- Afdila, A., & Adnan, M. F. (2023). Digitalisasi administrasi publik sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 12–19. <https://doi.org/10.69989/4gt1t617>
- Al-Hujran, O., et al. (2015). The imperative of influencing citizen attitude toward e-government adoption and use. *Computers in Human Behavior*, 53, 189–203. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.06.025>
- Al-Shboul, M. A., et al. (2017). The impact of e-government services on processing time and user satisfaction: A case study of Jordan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 11(3), 388–413. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2016-0087>
- Anthopoulos, L. G. (2017). *Understanding smart cities: A tool for smart government or an industrial trend?* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-57015-0>
- Asyidiq, M. M., et al. (2023). Pengaruh kinerja pegawai dan penggunaan teknologi informasi terhadap kepuasan masyarakat (Studi pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kabupaten Jember). *Journal MISSY (Management and Business Strategy)*, 4(2), 122–134. <https://doi.org/10.24929/missy.v4i2.2719>
- Bertot, J. C., et al. (2016). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. In M. Janssen, K. V. Andersen, B. C. M. van Oranje, & S. Z. Nam (Eds.), *Transforming government and building the information society* (pp. 147–157). Springer.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Destriana, W. H., et al. (2023). Pengaruh implementasi kebijakan e-government dan tata kelola pemerintah terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Administration and Education Management*, 6.
- Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57, Article 101994. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>
- Febrina, D. C., et al. (2022). Pengaruh penerapan Elektronik Remunerasi Kinerja (E-Rk) terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 63–71. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41261>
- Handika, R., et al. (2019). Perbandingan kinerja pegawai sebelum dan sesudah penerapan e-government (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus). *Wacana Publik*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.37295/wp.v12i01.7>



- Iqlimah, A., et al. (2024). Tantangan dan peluang administrasi publik dalam membangun kapasitas pemerintah daerah. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(4), 01–07.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Tahun 2019*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kim, S., & Lee, J. (2012). E-participation, transparency, and trust in local government. *Public Administration Review*, 72(6), 819–828. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02596.x>
- Laudon, K., & Laudon, J. (2019). *Management information systems: Managing the digital firm, Global Edition*.
- Luna-Reyes, L. F., et al. (2013). Inter-organizational collaboration and information integration in e-government initiatives. *Government Information Quarterly*, 30(1), 81–89. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.08.003>
- Moulina, W., et al. (2023). Implementasi kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) di Univeristas Sriwijaya. *@-Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.37858/publik.v3i2.379>
- Pina, V., et al. (2010). Are ICTs promoting transparency and accountability in EU local governments? *International Review of Administrative Sciences*, 76(3), 501–527. <https://doi.org/10.1177/0020852310372508>
- Venkatesh, V., et al. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 10(2), 149–160.